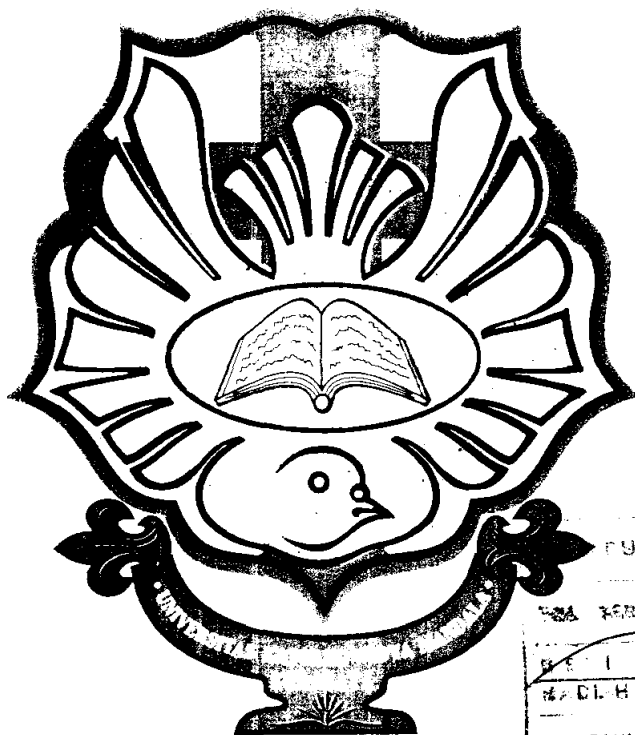


**PERANAN MEKANISME GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA  
PERUSAHAAN**



NO. BUKU	1249/13
TANGGAL PEROLEHAN	14-3-2013
NO. DOKUMEN	FB
NO. PENYUSUN	FB-CL Lim P
NO. PENYUSUN	

Oleh :

**LIE ALEX LIMANTARA**

**3203004116**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA  
SURABAYA  
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TUGAS AKHIR MAKALAH**

**PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BERPENGARUH  
TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN**

Oleh :

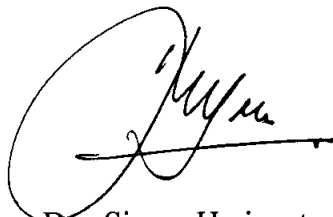
**LIE ALEX LIMANTARA**

**3203004116**

Telah disetujui dan Diterima dengan baik

Untuk diajukan kepada Tim Penguji

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simon Hariyanto', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Drs. Simon Hariyanto, Ak

Tanggal :

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir Makalah ini ditulis oleh: Lie Alex Limantara

NRP: 3203004116

Telah diujikan pada tanggal .....<sup>11 Juli 2009</sup> Di hadapan Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

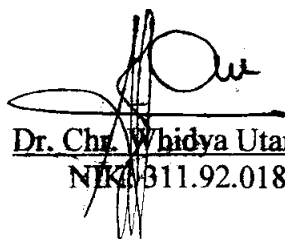


Drs. Toto Warsoko Pikir, M.Si, Ak

NIK : 321.83.0103

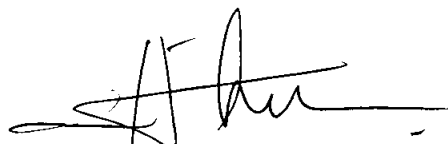
Dekan,

Ketua Jurusan,



Dr. Chy. Whidya Utami, MM

NIK: 311.92.0185



Yohanes Harimurti, SE., M.Si, Ak

NIK: 321.99.0392

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Lie Alex Limantara

Nomor pokok : 3203004116

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi


Alamat/Telepon : Jl. Kedung Klinter 4 No. 7 / 5327992

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa makalah Tugas Akhir yang saya buat adalah hasil pemikiran saya sendiri dan tidak merupakan hasil plagiat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Dan bersedia menerima sanksi apabila saya melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini.

Surabaya, 10 Juli 2009

Yang Membuat Pernyataan

ENAM RIBU  
600  
Tgl. 20  
METER TEMPER  
  
LIE ALEX LIMANTARA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan makalah ini.

Maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Selama penulisan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Chr. Widya Utami, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandala Surabaya.
2. Bapak Yohanes Harimurti, S.E., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Dosen Wali
3. Bapak Drs. Simon Hariyanto, Ak., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.
4. Bapak Drs. Toto Warsoko P, M.Si, Ak., selaku Ketua Pemimpin Sidang terima kasih atas waktunya selama ini.
5. Teman –teman yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Terutama untuk Pak Sugondo Sukotjo, Pak Hendra Kepiting,

Bu Yulia, Pak Subahgio Subandono, dan temen-temen lain yang selalu support Thanks All.

6. Orang tua dan Saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu penulis selama menyelesaikan makalah ini.

Penulis telah berusaha dalam penyusunan makalah ini, namun karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, penulis berharap agar makalah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Juli 2009



LIE ALEX LIMANTARA

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
1. ABSTRAKSI .....	1
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. POKOK BAHASAN.....	4
3. TUJUAN PEMBAHASAN.....	4
4. LANDASAN TEORI .....	5
5. PEMBAHASAN .....	35
6. SIMPULAN .....	45
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Antara Laba Akuntansi dan Ekonomik .....	24
---	----



## ABSTRAKSI

*Good Corporate Governance* (Tata Kelola perusahaan yang baik) adalah suatu sistem yang diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif, transparan, dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Makalah ini membahas peranan kepemilikan institusional (*institutional ownership*), kepemilikan manajerial (*managerial ownership*), komposisi komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas laba.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan makalah ini adalah peranan kepemilikan institusional (*institutional ownership*) terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Sehingga dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka kualitas laba yang dilaporkan akan meningkat.

Peranan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Peranan komposisi komisaris independen terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka kualitas laba yang dilaporkan juga meningkat. Dan peranan komite audit terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana mengungkapkan bahwa *size* komite audit mempunyai pengaruh dalam hal pengendalian intern, semakin besar komite audit kemungkinan mekanisme pengendalian akan berjalan efektif karena anggota-anggota komite audit mempunyai tanggung jawab dan status kekuasaan organisasi.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Kualitas laba, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi komisaris independen dan komite audit .

### Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki, sehingga bentuk usaha semacam ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar karena adanya kemudahan untuk

menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham. Pada perusahaan semacam ini, pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola atau manajemen perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Fungsi masing-masing pihak tidak dapat dipadukan, dimana pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola atau manajemen adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi perusahaan.

Manajemen, sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan tugas untuk mengelola modal dari pemilik atau pemegang saham harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya, dan sarana pertanggungjawaban yang digunakan oleh manajemen adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan agar dapat memberikan informasi akuntansi yang dapat memberikan gambaran mengenai nilai fundamental perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*). Oleh karenanya, laporan keuangan bermanfaat untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis oleh penggunanya.

Pada dasarnya pengguna laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengguna internal meliputi manajemen perusahaan dan pengguna eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan, konsumen serta masyarakat. Dengan adanya pemisahan fungsi kepemilikan dengan pengelolaan, sangat dimungkinkan terjadi konflik kepentingan (*conflict interest*) antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Kepentingan manajemen yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham atau pengguna

eksternal lainnya ini dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) (Indra , 2008 :2 )

Pada dasarnya proses penyusunan laporan keuangan banyak melibatkan penilaian (*judgement*) dan estimasi. Standar akuntansi yang ada juga memberikan fleksibilitas kepada manajer untuk melibatkan subyektifitas mereka dalam membuat estimasi. Akibat dari adanya berbagai asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka perusahaan dapat melakukan berbagai penyesuaian yang dirasa menguntungkan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak *reliable* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis para penggunanya. Bagi para *stakeholders*, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan investasi dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan juga mengontrol kinerja manajemen.

Pada lingkungan pasar modal laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan sumber informasi sangat penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar pemakai laporan dan atau pelaku pasar . Dari informasi yang diperoleh di laboran keuangan, laba menjadi pusat perhatian pakai pemakai (Beattie et al, 1994; dalam Gideon, 2005:173).

Suatu sistem yang diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif, transparan, dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem yang mewakili ini semua adalah *Good Corporate Governance* (Tata Kelola perusahaan yang baik). Dalam melaksanakan sistem *Good Corporate Governance* diperlukan suatu kerangka yang menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan suatu

tindakan dalam perusahaan. Kerangka tersebut berisi hukum, regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, konsumen, dan lain-lain.

Sistem *Good Corporate Governace* yang efektif harus mampu mengatur kewenangan direksi yang bertujuan agar dapat menahan direksi untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh dan juga untuk memastikan bahwa direksi bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Sistem *Good Corporate Governance* pada umumnya memiliki lima prinsip yang dijadikan dasar bagi perusahaan agar tercipta suasana kondusif yang menjamin kepentingan masing-masing pihak, yaitu: *Fairness, Transparency, Accountability, Responsibility, dan Independency*. (Indra, 2005:68)

Dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal tersebut terbukti dengan semakin diburunya perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* oleh investor dan semakin meningkatnya saham-saham perusahaan tersebut. Sebaliknya perusahaan yang tidak sungguh-sungguh menerapkan *Good Corporate Governance* seperti di negara Indonesia, Filipina, dan Pakistan Indeks sahamnya berantakan semua (Djarmiko, 2001:25).

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang keterkaitan antara *Good Corporate Governance* dengan kualitas laba (*earning quality*). Tinjauan yang digunakan untuk mewakili GCG mengacu pada kepemilikan institusional (*institutional ownership*), kepemilikan manajerial (*managerial ownership*), komposisi komisaris independen dan komite audit .

## **Pokok Bahasan**

Pokok bahasan makalah tugas akhir ini adalah: “Bagaimana peranan kepemilikan institusional (*institutional ownership*), kepemilikan manajerial (*managerial ownership*), komposisi komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas laba ?”.

## **Tujuan Pembahasan**

Tujuan pembahasan makalah tugas akhir ini adalah untuk mengetahui peranan kepemilikan institusional (*institutional ownership*), kepemilikan manajerial (*managerial ownership*), komposisi komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas laba.

## LANDASAN TEORI

### *Good Corporate Governance*

*Corporate governance* dikenal sebagai suatu bentuk mekanisme yang menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik bagi kepentingan stakeholders. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *corporate governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat. Selain itu, *corporate governance* dikatakan sebagai suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan, yang antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi.

*Corporate governance* mengatur pola hubungan antara komisaris, direksi dan manajemen agar terjadi *checks and balances* dalam pengelolaan organisasi untuk mendorong terciptanya kinerja yang kompetitif dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, misalnya direksi, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

## Prinsip-prinsip Corporate Governance

Untuk mewujudkan *corporate governance* sebagai bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, terdapat empat prinsip dasar yang merupakan bagian dari praktik *good corporate governance* yang harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi, yaitu (Mardjana, 2000):

1. **Transparansi (*transparency*)**. Transparansi berkaitan dengan banyaknya *disclosure* atau keterbukaan informasi mengenai kinerja, struktur dan operasi perusahaan. Selain itu, transparansi juga menyangkut ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada seluruh *stakeholder*. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan adanya transparansi, pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan, termasuk kreditor, pemasok, investor dan karyawan mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang mungkin diperoleh dalam melakukan transaksi dengan perusahaan.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**. Akuntabilitas merupakan salah satu solusi pokok untuk mengatasi masalah *agency problem*. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktik-praktik audit yang sehat. Dengan demikian akuntabilitas akan tercapai dengan terciptanya pengawasan efektif yang berdasarkan pada pembagian wewenang, peranan, hak dan tanggung jawab antara pemegang saham, komisaris dan direksi.
3. **Responsibilitas (*responsibility*)**. Responsibilitas mencakup pertanggung jawaban perusahaan kepada *stakeholders*, yang antara lain meliputi aspek-

aspek manajerial perusahaan, seperti sasaran dalam mencapai *cost efficiency*, peningkatan daya saing, menggali setiap potensi memperoleh laba, apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menangani mismanajemen dan apakah dewan direksi tetap mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya kepentingan pemegang saham mayoritas. Terkait pula dalam prinsip responsibilitas, pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada, seperti melalui program *community development*.

4. Keadilan (*fairness*). Prinsip keadilan mencakup tentang perlunya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan. Prinsip ini mewajibkan adanya kepastian perlindungan atas hak seluruh pemegang saham dari penipuan (*fraud*) dan penyimpangan lainnya.

Secara keseluruhan, konsep *corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mencegah atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan suatu mekanisme kontrol bagi *stakeholder*. Dengan beberapa prinsip dasar tersebut, maka *corporate governance* memberikan arti yang sangat penting dalam membentuk perilaku korporasi yang responsif terhadap berbagai tekanan pasar, tantangan investasi baru, dan peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dinamis.

Menurut Wignjohartojo (2001), perusahaan dikatakan telah mengimplementasikan konsep *corporate governance* dengan dengan baik dapat



dalam menjalankan analisis investasinya. Hal ini tentunya mendukung pendapat Busbee (1998) yang menyatakan bahwa *sophisticated investors* tentunya tidak akan mudah diperadaya oleh tindakan manipulasi manajer karena telah melakukan fungsi *monitoring* dan analisis yang baik terhadap investasinya.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa investor institusional merupakan *informed investors* dibandingkan investor individual. Hal ini memungkinkan mereka melakukan aktivitas *monitoring* dengan lebih efektif, sehingga dapat membatasi fleksibilitas manajer dalam memilih metode akuntansi untuk merekayasa laba perusahaan demi kepentingan pribadi mereka. Selain itu, investor institusional kini mulai bergeser dari *trading* menjadi *owning*. Dengan horizon yang menjadi lebih permanen ini maka investor institusional mulai menyentuh isu *corporate governance* dengan melakukan pengawasan yang lebih aktif serta lebih memperhatikan kinerja jangka panjang perusahaan dan bukan hanya menekankan pada laba jangka pendek, sehingga kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku oportunistik manajemen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

#### b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Pada dasarnya kepemilikan manajerial dapat memiliki efek yang berbeda terhadap

perilaku oportunistik manajer dalam sebuah perusahaan. Loebbecke (1989) menyebutkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dalam jumlah yang signifikan dapat memotivasi manajer untuk melakukan manipulasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham yang tinggi. Sedangkan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) dapat mensejajarkan kepentingan pemilik atau pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan yang dapat mendorong manajer untuk melakukan manipulasi. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan manajemen laba. Beberapa penelitian lanjutan seperti yang dilakukan oleh Beasley (1996) dan Abbot (2000) dan Midiastuty & Machfoedz (2003) yang dilakukan di Indonesia mendukung hasil penelitian Jensen dan Meckling.

### c. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan salah satu komponen penting dari *good corporate governance*. Secara teori dan praktek tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perseroan, serta menggagalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan esensi *corporate governance* yaitu peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan *stakeholder* lain (Keasey dan Wright, 1997).

Aktivitas monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipandang sebagai suatu bentuk pemecahan yang efektif terhadap masalah keagcnan yang terjadi antara *principal* atau manajer dan *agent* atau pemegang saham.

Namun demikian, benturan kepentingan juga seringkali terjadi diantara pemegang saham. Hal ini terjadi terutama pada perusahaan yang mempunyai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang kepentingannya tidak selalu sejalan. Kepentingan pemegang saham minoritas yang jumlahnya besar dan tersebar sering tidak terwakili dengan baik, sehingga menyebabkan kedudukan dan kewenangannya menjadi kurang penting. Tujuan menghadirkan komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris, yang sebagian besar anggotanya ditentukan dan diangkat oleh pemegang saham mayoritas.

Berbeda dengan praktek hukum di Amerika Serikat atau Inggris, di Indonesia aturan mengenai komisaris independen tidak terdapat dalam UU PT maupun UU Pasar Modal. Hal ini disebabkan karena struktur korporasi di Amerika Serikat dan Inggris menganut *one tier system*, dimana dalam perusahaan hanya terdapat satu dewan saja yaitu dewan direksi (*board of director*), sehingga diperlukan adanya *outside director* atau *non executive director* yang melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan. Sedangkan Indonesia menganut struktur korporasi *two tier system* dimana terdapat dua dewan dalam perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab berbeda.

Dewan direksi bertugas untuk menjalankan dan mengelola perusahaan, dan dewan komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan masukan, jadi seharusnya semua komisaris bersifat independen.

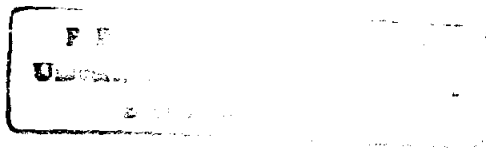
Namun, kenyataannya banyak komisaris yang masih berada dibawah kendali pemegang saham mayoritas sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap direksi dengan baik. Oleh karena itu praktik *corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Proporsi dewan komisaris dalam perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat dan dapat bertindak secara independen. Menurut peraturan pencatatan no. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimal 30%. Dalam rangka penerapan *good corporate governance*, perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Indra, 2005 :135)

Komisaris independen bertanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar dewan komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik dan bertindak sebagai penasehat direksi serta memastikan bahwa

perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut, memastikan bahwa perusahaan dikelola oleh orang-orang yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independent (Indra, 2005 :137) antara lain:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
5. Tidak menjadi partner atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa peiayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi.
6. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi.



7. Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi kecuali hanya sebagai komisaris independen.

Sebagai seorang profesional, seorang komisaris independen juga harus memiliki kompetensi pribadi sebagai pendukung agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu:

1. Memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan.
2. Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan.
3. Memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap strategi bisnis.
4. Memahami seluk beluk industri yang digeluti perusahaan.
5. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.
6. Memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis.
7. Memiliki karakter sebagai pemimpin yang profesional.
8. Memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi dan bekerjasama dengan orang lain.
9. Memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independen.
10. Memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen secara profesional.

#### d. Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Secara formal komite audit diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995, melalui Surat Keputusan (SK) direksi Bank Indonesia, yang mewajibkan kepada bank-bank di Indonesia untuk membentuk komite tersebut. Di Amerika, komite tersebut sudah dikenal secara resmi sejak tahun 1937, melalui usulan dari AICPA.

Komite eksekutif dari AICPA merekomendasikan bahwa komite audit dibentuk untuk memberikan *review* yang independen terhadap kebijakan dan operasi keuangan manajemen, mengadakan penilaian apakah kebijakan tersebut baik bagi perusahaan dan baik pula bagi kepentingan publik. Pada awal tahun 1940-an *Securities and Exchange Commission* (SEC) secara informal telah mendukungnya dan di tahun 1979, SEC mengakuinya secara resmi dengan mensyaratkan kepada semua perusahaan yang menjual saham di pasar modal untuk membentuk komite audit. Saat ini di Indonesia, melalui surat edaran PT. Bursa Efek Jakarta no. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 telah diatur mengenai keanggotaan komite audit dengan anggota komite audit yang berasal dari pihak eksternal.

Komite audit timbul sebagai akibat peran pengawasan dan akuntabilitas dewan perusahaan pada umumnya belum memadai. Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemerisaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan

pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan.

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independen komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari peranan direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Pentingnya komite audit dalam suatu perusahaan terbuka dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Surat Edaran Ketua Bapepam No.Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit.

Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten untuk memiliki komite audit. Ketentuan ini menyebutkan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.



2. Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2004. Ketentuan ini menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atas hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Ke-133/M-BUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan ini menyebutkan bahwa audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelapor dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris.
4. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diklurkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Audit No.48 menetapkan persyaratan bagi auditor bahwa masalah-masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan dalam proses pelaporan keuangan. Pihak yang disebut sebagai penerima informasi dalam ketentuan tersebut adalah komite audit.

Syarat suatu komite audit adalah:

1. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

2. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Salah seorang dari anggota audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan / atau non-audit pada elemen atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2 tentang Independen Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama emiten.
10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
11. Tidak merangkap sebagai anggota audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode.
12. Sekretariat perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktur, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen. Komite audit timbul memenuhi tuntutan tersebut.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

### 3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi (*transparancy*) dikembangkan dalam tugas ini.
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biata eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akutabilitas (*accountability*).
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*).

Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu.

Komite audit dapat melakukan sinergi dengan internal audit, untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam hal pengendalian intern Kalbers dan Fogarty (1993) juga mengungkapkan bahwa *size* komite audit mempunyai peranan dalam hal pengendalian intern, semakin besar komite audit kemungkinan mekanisme pengendalian akan berjalan efektif karena anggota-anggota komite audit mempunyai tanggung jawab dan status kekuasaan organisasi yang bertambah dalam hal *monitoring*. Andreson, *et al* (2004) mengungkapkan bahwa dengan *size* komite audit yang lebih besar diharapkan lebih banyak sumber daya yang dicurahkan dalam hal untuk mengawasi laporan keuangan dan sistem internal kontrol perusahaan. Hal ini tentunya dapat mengurangi praktek *erarnings management* yang dilakukan oleh manajemen.

#### Pengertian Laba

Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar dicapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi khususnya bagi investor dan

kreditor. Hendriksen dan Van Breda (1992) mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan (konvensional) masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan berikut :

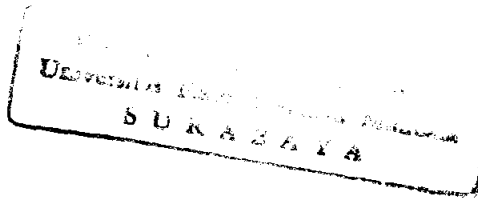
- a. Laba akuntansi belum didefinisikan secara semantic dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna
- b. Penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual
- c. Prinsip akuntansi berterima umum (PABU) sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antarperusahaan
- d. Karena didasarkan pada konsep kos histories, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan peranan perubahan daya beli dan harga
- e. Dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak

Akuntansi menganut asas akrual untuk mendapatkan suatu angka yang lebih bermakna secara ekonomik daripada sekedar kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode. Angka laba akan bermakna kalau tidak merepresentasi perubahan kemakmuran (*wealth*) atau penciptaan nilai (*value creation*) sebagai hasil kinerja ekonomik suatu kesatuan usaha. Secara teknis, perubahan kemakmuran atau nilai diwujudkan dalam kegiatan produktif (menghasilkan barang dan jasa)

Laba Akuntansi adalah laba dari kaca mata perekayasa akuntansi atau kesatuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan terandalkan. Oleh karena itu, laba akuntansi didasarkan pada data yang telah terjadi bukannya data hipotesis yang dapat berupa kos kesempatan (*opportunity cost*). Pengertian ekonomik dari segi akuntansi adalah kelayakan ekonomik (*economic reasonableness*) jangka panjang dan bukan penilaian ekonomik (*economic valuation*) jangka pendek. Oleh karena itu, depresiasi dalam akuntansi merupakan proses alokasi dan bukan proses penilaian.

Sementara itu, laba ekonomik adalah laba dari kaca mata investor karena keperluan untuk menilai investasi dalam saham yang dalam banyak hal bersifat subjektif bergantung pada karakteristik investor. Dalam menilai investasinya, investor selalu mendasarkan diri pada kos kesempatan yang diwujudkan dalam bentuk tingkat kembalian pasar (*market rate of return*). Dengan demikian, laba di mata investor adalah tingkat kembalian internal (*internal rate of return*) aliran-aliran kas masa datang yang dapat dihasilkan scandainya investor menanamkan asetnya ditempat lain (kos kesempatan). Di mata investor, penilaian asset lebih banyak didasarkan pada informasi pasar yang berubah-ubah setiap saat dan depresiasi dipandang sebagai proses penilaian asset (penurunan nilai).

Perbedaan sudut pandang di atas menjadikan laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomik. Hendriksen dan Van Breda (1992:316) menyederhanakan perbedaan laba akuntansi dan ekonomik atas dasar konsep depresiasi. Laba akuntansi dihitung atas dasar depresiasi akuntansi (alokasi) dan laba ekonomik dihitung atas dasar depresiasi ekonomik (penurunan nilai).



Selain perbedaan di atas, laba ekonomik berbeda dengan laba akuntansi karena pada umumnya laba ekonomik memperhitungkan perubahan daya beli uang (perubahan harga umum) dan perubahan harga spesifik asset. Daya beli uang diperhitungkan karena investor lebih berkepentingan dengan kos kesempatan untuk meningkatkan relevansi informasi dengan cara melengkapi seperangkat statemen pokok (kos histories) dengan laporan pelengkap untuk menunjukkan peranan perubahan harga dan daya beli.

Laba akuntansi juga berbeda dengan laba ekonomik karena konsep dasar yang dianut. Laba akuntansi dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha yang memandang asset sebagai sisa potensi jasa sehingga kos histories menjadi basis pengukurannya. Sementara itu, laba ekonomik dilandasi oleh konsep likuiditas yang melihat asset sebagai simpanan atau sediaan nilai (*store of value*) setiap saat sehingga nilai sekarang menjadi basis pengukurannya. Dengan demikian, laba dipandang sebagai perubahan nilai dalam suatu periode.

Jadi dari beberapa aspek, laba akuntansi memang dan harus berbeda dengan laba ekonomik. Namun, laba akuntansi diharapkan dapat menjadi estimator atau indikator laba ekonomik. Tabel 4.1 dibawah ini meringkas perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomik.

**Tabel 4.1**

**Perbandingan Antara Laba Akuntansi dan Ekonomik**

<b>Aspek Pembeda</b>	<b>Lab a Akuntansi</b>	<b>Lab a Ekonomik</b>
sudut pandang pemaknaan	Perekayasa akuntansi, penyusun standar, atau penyusun statemen keuangan	Pemegang Saham
Dasar Pengukuran	Kos Historis	Kos Kesempatan, Nilai Pasar, Nilai Likuiditas
pengertian “Ekonomik”	Kelayakan ekonomik jangka panjang	Penilaian ekonomik jangka panjang



Aspek Pembeda	Laba Akuntansi	Laba Ekonomik
Makna depresiasi	Alokasi kos	Penurunan nilai ekonomik
Unit pengukur	Rupiah nominal	Daya beli
Sasaran pengukuran atau sifat laba	Laba uang/nominal	Laba real
Konsep dasar yang melandasi	Kontinuitas usaha, asas akrual	Likuidasi, nilai tunai
Fungsi aset	Sisa potensi jasa	Simpanan/sediaan nilai

Menurut analisis, laba akuntansi mengandung gangguan (*noise*) akibat penerapan PABU yang dalam banyak hal tidak merefleksikan realitas ekonomi (misalnya penggunaan kos histories) atau akibat manajemen laba (*earnings management*). Oleh karena itu, kalau laba akuntansi bebas dari gangguan dan mendekati laba ekonomi, laba akuntansi akan menjadi prediktor yang handal. Dengan demikian, kedekatan atau korelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomi akan menentukan kualitas laba akuntansi (*earnings quality*).

### Kualitas Laba

Kualitas laba dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba yang memberikan respon kepada pasar. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (*power of response*). Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari tingginya *earnings response coefficients (ERC)*, menunjukkan laba yang dilaporkan berkualitas. Scott (2000), Cho dan Jung (1991) menyatakan bahwa *ERC* mengukur seberapa besar *return* saham dalam merespon angka laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut.

Dengan kata lain *ERC* adalah reaksi atas laba yang diumumkan (*published*) oleh perusahaan. Reaksi ini mencerminkan kualitas dari laba yang

dilaporkan perusahaan. Dan tinggi rendahnya *ERC* sangat ditentukan kekuatan responsif yang tercermin dari informasi (*good/ bad news*) yang terkandung dalam laba. *ERC* merupakan salah satu ukuran atau proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas laba (Collins et al., 1984; Cornell dan Landsman, 1989; Lee dan Park, 2000; Kross dan Schroeder, 1990).

Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan prinsipal. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Mekanisme *corporate governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba. Menurut Schroeder dan Clark (1995) konsekuensi pelaporan keuangan dapat mempengaruhi :

1. Distribusi kekayaan antar investor
2. Tingkat resiko yang diterima perusahaan
3. Tingkat pembentukan modal dalam perekonomian.

Kualitas informasi akuntansi menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) nomor 2 (FASB, 1989) dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, para pemakai yang memanfaatkan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan

keputusan, kedua kegunaan informasi. Berikut ini dijelaskan kedua dimensi kualitas informasi akuntansi.

1. Dimensi para pemakai, informasi akuntansi yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan ditentukan oleh kualitas spesifiknya yaitu dapat dipahami (*understability*). Informasi akuntansi menjadi tidak berguna sebagai dasar pengambilan keputusan, apabila tidak dapat dimengerti atau dipahami.
2. Dimensi kegunaan, informasi akuntansi yang berguna harus memenuhi kualitas utama dan kualitas kedua sebagai berikut :

- a. Kualitas utama

Informasi akuntansi harus memenuhi unsur atau komponen relevan dan handal atau dapat dipercaya. Agar memenuhi unsur relevan, informasi harus bernilai prediktif, bernilai umpan balik tepat waktu. Nilai prediktif berarti bahwa informasi dapat membantu para pemakainya untuk meningkatkan dalam memperoleh hasil melalui prediksi yang cermat berdasarkan kejadian waktu lampau dan sekarang. Umpan balik berarti bahwa informasi dapat memungkinkan atau mengoreksi ekspektasinya yang telah dilakukan pada waktu lampau. Dan tepat waktu berarti bahwa informasi siap digunakan oleh para pemakainya sebelum kehilangan makna dan kapasitasnya dalam mempengaruhi dan menentukan berbagai keputusan.

Agar memenuhi unsur handal atau dapat dipercaya, informasi harus berdaya uji atau dapat diperiksa, penyajian yang jujur dan netral. Berdaya uji berarti informasi yang telah disajikan berdasarkan metode tertentu.

Apabila diverifikasi dengan metode yang sama oleh pihak lain yang independent, hasilnya sama atau tidak berbeda. Penyajian yang jujur berarti informasi dijamin keabsahan dan kewajarannya. Netral berarti bahwa informasi disajikan tidak dapat memihak dan bebas dari bias atau ditujukan untuk kepentingan yang bersifat umum.

b. Kualitas kedua

Informasi harus memenuhi unsur atau komponen berdaya banding, termasuk konsistensi. Berdaya banding berarti bahwa informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi yang berbeda atau sejenis diantara dua kesatuan fenomena ekonomi. Konsistensi berarti bahwa informasi menggunakan kebijakan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode khusus berkenaan dengan laba rugi.

SFAC No. 2 (FASM, 1980) menyatakan bahwa laporan laba rugi sangat penting bagi para pemakainya karena memiliki nilai prediksi, menurut SFAC No.1, unsur-unsur laporan laba rugi merupakan fokus utama laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang kinerja keuangan. Dikatakan bahwa laba bersih harus mencerminkan pemegang saham dalam suatu periode.

Sedangkan PSAK No.1 (2004) menyatakan bahwa informasi mengenai kinerja perusahaan, terutama informasi tentang probabilitas dipertukarkan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan. Dalam hal ini informasi tentang fluktuasi kinerja menjadi penting, di samping bermanfaat untuk

menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, juga berguna untuk merumuskan pertimbangan mengenai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Investor mempunyai anggapan bahwa pengumuman laba memiliki kandungan. Informasi yang bermanfaat untuk mengestimasi *expected value* dan resiko dari *return* sekuritas. Laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten. Beberapa riset empiris menunjukkan bahwa pengumuman laba mempunyai kandungan informasi dan pasar bereaksi atas pengumuman laba. Reaksi pasar dapat tercermin dari naik turunnya (*volatility*) volume transaksi perdagangan dan harga saham (Beaver, 1968 ; Daley et al, 1995, Bartau Et al, 2000, Purba, 1997, Sedikir 2000).

Hartono (2003) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Lucia (2006) menyatakan bahwa keputusan ekonomi yang dibuat oleh pelaku pasar berdasar informasi yang diperoleh dari laporan keuangan, umumnya tercermin dalam tindakan pelaku pasar yang disebut dengan reaksi pasar. Reaksi pasar dipicu oleh berbagai hal, salah satunya adalah pengumuman yang berhubungan dengan laba (*earning related announcements*). Pengumuman yang terkait dengan laba tersebut yang menyebabkan timbulnya reaksi pasar meliputi pengumuman laporan tahunan awal, laporan tahunan rinci, laporan interim awal, laporan interim rinci dan laporan perubahan metoda-metoda akuntansi, laporan auditor dan sebagainya. Secara empiris, terbukti bahwa informasi laba direaksi oleh

pasar modal yang ditunjukkan oleh adanya perubahan harga dan volume saham di pasar modal ketika laba diumumkan.

Menurut Scoot (2000) informasi laba dapat berguna apabila informasi laba tersebut dapat mengakibatkan para investor mengubah keyakinan dan tindakan mereka dan tingkat kegunaan tersebut dapat diukur dengan sejumlah masa perubahan harga mengikuti pengumuman informasi laba tersebut.

Faster (1986) menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi kandungan informasi dari suatu pengumuman informasi perusahaan. Pertama, ekspektasi pasar modal terhadap kandungan dan *timing* dari pengumuman tersebut. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi ekspektasi pasar adalah ketidakpastian terhadap kandungan dan *timing* perusahaan.

Semakin besar tingkat ketidakpastian akan semakin besar pula potensi terjadinya revisi terhadap distribusi terhadap harga-harga sekuritas. Kedua, implikasi pengumuman informasi tersebut terhadap return sekuritas di masa depan. Semakin besar revisi yang berhubungan dengan aliran kas yang diharapkan akan semakin besar pula implikasi revaluasi harga sekuritas terhadap pengumuman informasi tersebut. Ketiga, kredibilitas sumber informasi. Semakin kredibel suatu sumber pengumuman informasi akan semakin besar pula implikasi revaluasi terhadap informasi itu.

Dantah dan Ronen (1993) memberikan definisi *information content* mencakup reaksi volume, reaksi harga dan *dispersi expected belief* yang diungkapkan sebelumnya, seperti penurunan *disperse* dalam kesimpulan terhadap *public disclosure* dan peningkatan dalam ketepatan atau presisi pengungkapan.

Secara khusus Dantah dan Ronen menyatakan bahwa definisi *information content* harus memenuhi tiga kriteria yaitu :

1. Harus mencerminkan perubahan keyakinan rata-rata tertimbang antar semua *traders* pasar.
2. Harus mencerminkan perbedaan tingkat sanksi dengan perubahan keyakinan yang terkait. Tingkat sanksi harus tampak terkait dengan distorsi gangguan yang melekat dalam pengumuman laba.
3. Harus diperoleh suatu harga ekuilibrium dan model *trading*, sehingga dapat dinyatakan secara empiris perihal sejumlah manifestasi yang dapat dipahami.

Ada alasan mengapa pasar bereaksi terhadap pengumuman informasi laporan keuangan atau pengumuman laba Scoot (2000) memberikan empat alasan sebagai berikut :

1. Para investor sebelumnya memiliki keyakinan tentang *expected return* dan resiko suatu saham perusahaan. Keyakinan sebelumnya ini didasarkan pada semua informasi yang tersedia secara terbuka, mencakup harga pasar, hanya sampai pada sebelum pengumuman laba bersih perusahaan. Meskipun didasarkan pada informasi yang tersedia secara publik, keyakinan sebelumnya

ini tidak perlu semuanya sama, karena para investor akan berbeda di dalam jumlah informasi yang mereka peroleh dan berbeda dalam kemampuan mereka untuk menginterpretasikannya. Keyakinan sebelumnya ini dapat juga mencakup ekspektasi terhadap *earning power* perusahaan pada saat ini dan masa depan, karena *return* sekuritas di masa depan akan tergantung pada profitabilitas perusahaan.

2. Berdasarkan pengumuman laba bersih tahun ini, sejumlah investor akan memutuskan untuk menjadi lebih terdidik (*informed*) dengan menganalisis angka-angka laba. Contohnya, jika laba bersih tinggi atau lebih dari yang diharapkan, maka hal tersebut *good news*. Sementara para investor yang lain yang barangkali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap laba bersih yang terjadi saat sekarang, mungkin akan menginterpretasikan angka-angka laba bersih yang sama sebagai *badnews*.
3. Para investor yang merevisi keyakinan mereka terhadap profitabilitas dan *return* masa depan yang tinggi akan cenderung membeli saham-saham perusahaan pada harga pasar saat ini dan sebaliknya untuk para investor yang sudah merevisi keyakinan mereka yang terlalu rendah (evaluasi mereka terhadap resiko dari saham-saham tersebut mungkin juga direvisi).
4. Kita dapat berharap untuk mengamati volume saham yang diperdagangkan segera meningkat setelah perusahaan melaporkan laba bersihnya, lebih jauh, volume ini harus lebih besar yang menunjukkan perbedaan keyakinan para investor sebelumnya dan didalam interpretasi mereka terhadap informasi keuangan saat ini. Jika para investor yang menginterpretasikan laba bersih



yang dilaporkan sebagai *good news* atau *bad news*, kita dapat mengharapkan untuk mengamati suatu kenaikan atau penurunan di dalam harga pasar dari saham-saham perusahaan.

Menurut Beaver (1968), laba dikatakan berkualitas apabila laba yang diumumkan memiliki informasi yang mampu mempengaruhi para pelaku pasar dalam mengambil keputusan dan mampu mendorong perubahan taksiran investor terhadap distribusi *return* di masa mendatang. Laba dianggap berkualitas jika mampu menjelaskan dan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan, baik kinerja fundamental maupun kinerja pasar. Informasi laporan laba dapat memberikan suatu respon positif maupun negatif terhadap volume perdagangan dan harga saham, jika investor mempunyai anggapan bahwa informasi laba mempunyai berita baik. Sebaliknya respon negatif akan terjadi jika investor mempunyai anggapan bahwa informasi laba mempunyai berita buruk (Ardmas Lako, 2001). Dari respon yang diberikan oleh partisipan dan investor sebagai pelaku bursa pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya perubahan nilai keseimbangan harga saham (Beaver, 1968).

Kualitas laba juga dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba memberikan respon kepada pasar. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (*power of response*). Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari tingginya *earnings response coefficients* (ERC) yang menunjukkan laba yang dilaporkan berkualitas. Scott (2000), Cho dan Jung (1991) menyatakan bahwa *earnings response coefficients* (ERC) mengukur seberapa besar *return* saham dalam merespon angka laba yang dilaporkan oleh

perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Dengan kata lain *earnings response coefficients* (ERC) adalah reaksi atas laba yang diumumkan (*published*) oleh perusahaan. Reaksi ini mencerminkan kualitas dari laba yang dilaporkan perusahaan. Dan tinggi rendahnya ERC sangat ditentukan kekuatan responsif yang tercermin dari informasi (*good* atau *bad news*) yang terkandung dalam laba. ERC merupakan salah satu ukuran atau proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas laba (Collins et al., 1984; Cornell dan Landsman, 1989; Lee dan Park, 2000; Kross dan Schroeder, 1990).

Menurut Gideon (2005) terdapat beberapa ukuran atau proksi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba yaitu :

- a. Persistensi (*persistence*)
- b. Kemampuan prediksi (*predictive ability*)
- c. Variabilitasnya (*variability*).
- d. Hubungan antara harga saham dengan informasi laba
- e. Hubungan antara return saham dengan informasi laba (*earnings response coefecient*)

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Good Corporate Governance**

Akibat dari krisis moneter yang melanda Indonesia, banyak perusahaan yang mulai memikirkan kembali bagaimana cara agar perusahaan dapat bertahan dalam arus bisnis. Munculnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), membuat perusahaan mempunyai suatu pegangan untuk dapat memperbaiki kinerja mereka.

Tindakan yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. GCG dapat diartikan sebagai rangkaian mekanisme bagi suatu perusahaan publik untuk diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan para petaruhnya (*stakeholders*). Mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai partisipan di dalam perusahaan.

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Kelola perusahaan yang baik bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa dana yang ditempatkan berupa pembelian saham di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar. Kelima tujuan utama dari

GCG tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG. Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, maka muncul kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Namun hingga saat belum ada kesepakatan bersama secara universal apa saja prinsip-prinsip GCG. Masing-masing negara, lembaga bisnis dan kajian merumuskan masing-masing, namun, pada dasarnya memiliki kesamaan.

Pentingnya *Corporate Governance* juga ditekankan oleh berbagai kalangan akademisi dengan tujuan akhir bahwa aplikasi konsep ini di perusahaan dapat memberikan nilai perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable*) dan sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders* yang terkait.

### **Peranan Kepemilikan Institusional pada *Good Corporate Governance***

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat adanya manipulasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Menurut Bushee (1998) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Pemikiran ini

didukung hasil penelitian Rajgopal dan Venkatachalam (1998) dan Pratana P Midiastry dan Mas'ud Mahfoedz (2003). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa kepemilikan institusional diperusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

Menurut Crutchley et al (1999), peranan kebijakan hutang terhadap kepemilikan institusional adalah positif. Kebijakan hutang yang tinggi menyebabkan perusahaan dimonitor oleh pihak debtholders. Karena monitoring dalam perusahaan yang ketat tadi menyebabkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan *debtholders* dan *shareholders*, sehingga kondisi ini akan menarik masuknya kepemilikan institusional.

### **Peranan Kepemilikan Manajerial pada *Good Corporate Governance***

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, kualitas laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda menghasilkan besaran kualitas laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua hal kriteria: (a) perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (*owner-manager*); (b) perusahaan dipimpin oleh manajer dan non pemilik (*non owner-manager*). Dua kriteria ini akan mempengaruhi kualitas laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang

mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005:175).

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Theresia (2002) menemukan kepemilikan institusional berperan secara positif terhadap kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional secara mayoritas akan mengurangi kemungkinan perusahaan untuk diakuisisi, sehingga meningkatkan keinginan manajer untuk memperbesar kepemilikan pada perusahaan. Namun sebaliknya, menurut Fitri dan Mamduh (2003) semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Menurut Crutchley dan Hansen (1989) serta Chen dan Steiner (1999) terdapat hubungan positif antara risiko dengan kepemilikan manajerial. Hubungan ini terjadi pada manajer yang *risk taker*. Peningkatan risiko menyebabkan perusahaan mengurangi pembayaran dividen tetapi meningkatkan kepemilikan manajerial dan hutang. Namun Wahidahwati (2002) menemukan adanya hubungan negatif antara risiko dan kepemilikan manajerial.

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah pula.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iskander dan Chamlou (2000) menyatakan bahwa salah satu elemen *corporate governance* yang penting adalah transparansi (*transparency*) atau keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada publik. Keterbukaan tidak mudah dilakukan jika manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terdapat manajemen yang memiliki andil sebagai pemilik (*managerial ownership*). Semakin besar prosentase Kepemilikan manajerial, maka kemungkinan untuk melakukan keterbukaan semakin kecil, sehingga perusahaan akan lebih memiliki risiko.

Menurut Jensen dan Meckling (1979; Morck dkk., 1989, dalam Boediono 2005:177), menyatakan bahwa kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar. Ross dkk (1999, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006:4) menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan sendiri.

Sensitivitas manajemen terhadap peranan para pemegang saham akan tergantung pada tingkat kontrol kepemilikan manjerial. Manajemen dengan kontrol kepemilikan yang besar memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan *self-serving behaviour* yang tidak meningkatkan nilai perusahaan dan bisa jadi memiliki lebih banyak kecenderungan untuk menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme untuk meningkatkan kualitas laba (Fala, 2007:8)

Manajemen diberi keleluasaan untuk memilih metode mana yang dianggapnya paling sesuai untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Sesuai dengan teori keagenan, manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasi yang mendorongnya untuk memilih metode tersebut. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kualitas keuangan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas laba.

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Gideon, 2005). Pemikiran ini didukung hasil penelitian Pratana P Midiastuty dan Mas'ud Mahfoedz (2003). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa kepemilikan institusional diperusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka kualitas laba yang dilaporkan akan meningkat.

### **Peranan Komposisi Dewan Komisaris Independen pada *Good Corporate Governance***

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good*



*corporate governance* di dalam perusahaan. Menurut pengertiannya komisaris merupakan lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol jalannya perusahaan yang dipimpin oleh Dewan Direksi. Pada prinsipnya Perseroan wajib mempunyai seorang Komisaris sedangkan Perseroan Wajib memiliki paling sedikit dua anggota komisaris jika bidang usaha perseroan menyerahkan dan masyarakat, atau perseroan menerbitkan Surat Pengakuan Utang atau Perseroan berbentuk Perseroan terbuka. Komisaris berfungsi sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perusahaan yang baik. Pembentukan Komisaris Independen dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Mengenai Komisaris Independen dapat ditemui dalam ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No Kep -339/BEJ/07-2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa Poin C mengatur hal-hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Komisaris.

Chtourou *et al* (2001) menginvestigasi apakah praktek tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki peranan kepada kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan. Mereka menemukan bahwa *earning management*

secara signifikan berhubungan dengan beberapa praktik *governance* oleh dewan komisaris dan komite audit. Untuk dewan komisaris, *income increasing earning management* yang rendah pada perusahaan yang memiliki *outside board members* yang berpengalaman sebagai *board members* pada perusahaan dan pada perusahaan lain.

Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Gideon (2005) dan Anderson *et al.* (2003). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa komposisi dewan komisaris di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan bahwa semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka kualitas laba yang dilaporkan juga meningkat.

### **Peranan Komite Audit pada Good Corporate Governance**

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara baik tidaknya proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik antara pemegang saham dan agen yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Jika konflik tersebut terus berjalan, kesempatan bagi manajemen akan melaporkan

laba untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba.

Pengaturan Komite Audit dapat dilihat dalam ketentuan Pasar Modal yaitu Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, (*Good Corporate Governance*) perusahaan tercatat wajib memiliki Komite Audit. Dimana Komite Audit ini bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan serta melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

Dalam hal pengendalian intern, Kalbers dan Fogarty (1993) mengungkapkan bahwa *size* komite audit mempunyai peranan dalam hal pengendalian intern, semakin besar komite audit kemungkinan mekanisme pengendalian akan berjalan efektif karena anggota-anggota komite audit mempunyai tanggung jawab dan status kekuasaan organisasi yang bertambah dalam hal *monitoring*. *Monitoring* yang bagus yang ditujukan kepada laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan. Suaryana (2005) juga meneliti hubungan antara komite audit yang memenuhi syarat dan pengaruhnya terhadap *earnings response coefficient*. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah *earnings response coefficient* perusahaan yang telah memiliki komite audit yang memenuhi syarat lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit yang memenuhi syarat. Hal itu selaras dengan Gideon

(2005) yang menyatakan bahwa komite audit berperan signifikan secara positif terhadap kualitas laba (*earnings response coefficient*) artinya komite audit dapat meningkatkan laba yang dilaporkan.

## SIMPULAN

Dari pembahasan pada sub bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan Bagaimana peranan kepemilikan institusional (*institutional ownership*), kepemilikan manajerial (*managerial ownership*), komposisi komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas laba ?”.

1. Peranan kepemilikan institusional (*institutional ownership*) terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Sehingga dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.
2. Peranan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa kepemilikan institusional dip perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka kualitas laba yang dilaporkan akan meningkat.

3. Peranan komposisi komisaris independent terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka kualitas laba yang dilaporkan juga meningkat.
4. Peranan komite audit terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana mengungkapkan bahwa *size* komite audit mempunyai peranan dalam hal pengendalian intern, semakin besar komite audit kemungkinan mekanisme pengendalian akan berjalan efektif karena anggota-anggota komite audit mempunyai tanggung jawab dan status kekuasaan organisasi yang bertambah dalam hal *monitoring*. *Monitoring* yang bagus yang ditujukan kepada laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bushee, B, 1998. *Institutional Investors, Long Term Investment, and earnings Management. Accounting Review*:305-333.
- Cruthley,C E dan R S Hansen. 1989. "A Test of Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage, and Corporate Dividends". **Financial Management**. Hal 36-46
- Dartoh, A. dan J. Ronen. 1993. *Information Content of Accounting Annourcement. The Accounting Review*. Vol. 58 Ocktober. P. 857 – 873.
- Foster (1986). *Consumer Behavior: Concept and Applications*, Third Edition, Mc Graw - Hill Book Co.
- Gideon, Boedijono. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Makalah Simposium Nasional VIII. Solo.
- Indra Surya., L.L.M 2008. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Iskander, Magdi R. dan Nadereh Chamlou. 2000. *Corporate Governance: A Framework for Implementation*. The International Bank for Reconstruction and Development. The World bank.
- Kalbers, L., and T. Fogarty. 1993. *Audit committee effectiveness: An empirical investigation of the contribution of power. Auditing: A Journal of Practice & Theory (Spring)*: 24-49.
- Keasey, Kevin and Mike Wright. 1997. *Corporate Governance: Responsibilities. Risk and Remuneration. Working Paper*.
- Mardjana, I Ketut. 2000. *Corporate Governance dan Privatisasi*. Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.2, No.2, Oktober-Desember. Hal:28-37
- Nur E.DP (2007) *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Vol 9. No 1 April 2007, Hal 88-108
- Porter, G. 1992. *Accounting Earnings Announcement, Institutional Investors Concentrations and Common Stock Returns, Journal of Accounting Research*, Vol.30. No.1. Hal.131-136.
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. New Jersey: Prentice – Hall, Inc.

- Suaryana, Agung. 2005. *Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Theresia. 2003. *Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Saham Institusional (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)*. **Jurnal Maksi**. Vol. 3, hal 98-114.
- Wardhani Ratna (2006), *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*.
- Wignjohartojo, Parwoto. 2001. *Good Corporate Governnace: Implementasi beserta Implikasi dan Masa depannya*. *Majalah Ekonomi*. Tahun XI, No.1, April. Hal 65-77.

